

The logo for KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) is located in the top left corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a white grid pattern. A thick red horizontal line runs across the page, passing behind the logo.

KSAP

Laporan Tahunan 2004

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENGANTAR KETUA KOMITE KERJA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



Binsar H. Simanjuntak

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dibentuk pertama kali pada tahun 2002 dengan Keputusan Menteri Keuangan dan diperbarui setiap tahunnya sampai tahun 2004. Pada 5 Oktober 2004 ditingkatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005.

KSAP menyusun Laporan Tahunan 2004 sebagai suatu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kinerja KSAP kepada Menteri Keuangan dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Laporan ini disusun pertama kali, sehingga juga memuat kegiatan KSAP tahun 2002 dan 2003.

Beberapa kegiatan penting telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2004, yaitu penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang terdiri dari Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP tersebut telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal tahun 2005. Sehingga KSAP berharap SAP akan segera ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu KSAP juga menyiapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara bertahap sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif SAP atas saran yang sangat berharga dalam penyusunan standar ini. Demikian pula kepada para anggota Komite Kerja, Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Tidak sedikit masukan yang kami terima dari Tim Penelaah SAP Badan Pemeriksa Keuangan, para akademisi dan praktisi dalam penyusunan SAP sehingga sangat membantu dalam proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan.

Kami merasa Laporan Tahunan 2004 belum sempurna, sehingga saran-saran sangat kami harapkan agar penyusunan laporan tahunan berikutnya dapat lebih baik.

Jakarta, 31 Mei 2005
Ketua Komite Kerja
ttd
Binsar H. Simanjuntak

SAMBUTAN KETUA KOMITE KONSULTATIF STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



Mulia P. Nasution

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengemban tugas yang berat dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar tersebut sedapat mungkin disusun agar mudah dipahami oleh para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Pada tahun ini Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan telah dilakukan harmonisasi dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga sudah dapat diajukan kepada Presiden dan diharapkan SAP akan segera ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.

Laporan Tahunan 2004 ini disusun KSAP untuk pertama kalinya, sehingga memuat pula kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang dimulai pada tahun 2002. Laporan tahunan ini menggambarkan kegiatan yang sudah berhasil dilakukan oleh KSAP dan kegiatan yang belum dapat dilakukan.

Komite Konsultatif menghargai upaya KSAP menyusun Laporan Tahunan 2004 agar dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada para *Stakeholders*, khususnya Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.

Dalam Strategi jangka panjang KSAP berencana menyusun standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-undang Perbendaharaan Negara. Saat ini komite sudah memulai kajian-kajian dan penyusunan standar tersebut secara bertahap.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif atas saran-saran yang telah diberikan kepada KSAP dalam melaksanakan tugasnya selama ini, dan kepada para anggota Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Demikian juga kepada Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP, serta pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan penyusunan SAP.

Semoga Laporan Tahunan 2004 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja KSAP.

Jakarta, 31 Mei 2005

ttd

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Mulia P. Nasution

DAFTAR ISI

PENGANTAR KETUA KOMITE KERJA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	i
SAMBUTAN KETUA KOMITE KONSULTATIF STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Organisasi dan Kedudukan KSAP	1
Keanggotaan KSAP	2
Tugas Pokok KSAP	3-4
BAB II RENCANA KERJA KSAP	5
Lingkungan Strategis	5
Rencana Strategis	6
Rencana Kerja Jangka Menengah Tahun 2004 s.d. 2005...	7
Program Kerja dan Kegiatan KSAP Tahun 2004	8
BAB III Kinerja KSAP	9
Capaian Kinerja	9
Pelaksanaan Kegiatan	9-13
Aspek Keuangan	13
Strategi Pemecahan Masalah	13
Kejadian Penting Setelah Periode Pelaporan 2004	14
BAB IV Rencana Kerja Tahun 2005	15-16
BAB V Penutup	17

BAB I



Ket: Sebagian anggota Komite Kerja

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD yang berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 57 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden. Standar akuntansi pemerintahan yang dihasilkan oleh KSAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Kegiatan KSAP dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan melalui bagian anggaran Departemen Keuangan.

ORGANISASI DAN KEDUDUKAN KSAP

KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Keppres Nomor 84 tersebut menegaskan bahwa KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan.

Sebelum keluarnya Keppres tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang fiskal, Menteri Keuangan RI telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 379/KMK.012/2004 tanggal 6 Agustus 2004.



Keterangan Foto: Rapat Pleno KSAP, 2005

Keanggotaan KSAP

KSAP adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi di sini meliputi keanggotaan dan mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan (*due process*). KSAP beranggota kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 84 Tahun 2004, keanggotaan KSAP terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja.

Komite Konsultatif terdiri dari:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara sebagai Anggota
4. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Anggota
5. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia sebagai Anggota
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia sebagai Anggota
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia sebagai Anggota

Komite Kerja terdiri dari:

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM sebagai Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM sebagai Anggota
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc sebagai Anggota
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM sebagai Anggota
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM sebagai Anggota
8. Drs. AB Triharta, Ak., MM sebagai Anggota
9. Iman Bastari, Ak., M.Acc sebagai Anggota.

Tugas Pokok KSAP



DR. Binsar Simanjuntak,
CMA., *Ketua*



Sonny Loho, Ak., MPM,
Sekretaris



Drs. Jan Hoesada,
MM., *Anggota*



Drs. A.B. Triharto Ak., MM,
Anggota



DR. Ilya Avianti, SE,
MSi., *Ak. Wakil Ketua*



Drs Sugijanto, Ak. MM.
Anggota



DR. Hekinus Manao, Ak.
MAcc., CGFM, *Anggota*

Berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Penyusunan konsep SAP ini secara operasional dilaksanakan oleh Komite Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja senantiasa berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Sesuai prosedur wajib yang tercantum dalam Kepres nomor 84 tahun 2004, dalam mempersiapkan, merumuskan dan menyusun RPP SAP Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best international practices*). Untuk membantu pelaksanaan tugas ini, KSAP membentuk Kelompok Kerja KSAP. Kelompok Kerja bertugas membantu Komite Kerja dalam perumusan dan pengembangan SAP.



DR. Soepomo Prodjo-
harjono, Ak., M.Soc. Sc
Anggota



Gatot
Supiartono, Ak.,
M.Acc, *Anggota*



Keanggotaan KSAP yang pertama kali dibentuk pada 13 Juni 2002 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 308/KMK.012/2002, terdiri dari lima orang Komite Pengarah, sebelas orang Komite Kerja yang dibantu oleh lima orang tenaga sekretariat.

Pada tahun 2003 keanggotaan KSAP diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.012/2003 pada tanggal 9 Mei 2003 dan tidak ada perubahan dalam susunan keanggotaan.

Dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan berasal dari profesional di bidang akuntansi dan berjumlah sebanyak-banyaknya sembilan orang, maka sementara menunggu Keputusan Presiden, dikeluarkanlah

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.012/2004 yang menetapkan bahwa KSAP beranggota empat orang Komite Konsultatif, sembilan orang Komite Kerja dan lima orang Sekretariat. Susunan keanggotaan KSAP sejak dibentuk pertama kali pada tahun 2002 sampai dengan 2004 dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan ini.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kerja dapat membentuk **Kelompok Kerja** yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Selain itu, KSAP juga dibantu oleh **Sekretariat KSAP**, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 547/KMK.06/2004 tentang Sekretariat KSAP.

Kelompok kerja terdiri dari:

1. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Ketua Merangkap Anggota;
2. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., Wakil Ketua Merangkap Anggota;
3. Margustienny OA, Ak., MBA, Anggota;
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota;
5. Amdi Very Dharma, Ak., MAcc, Anggota;
6. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA, Anggota;
7. Drs. I Made Suryawan, Anggota;
8. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota;
9. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota;
10. Wiwin Istanti, SE, Ak., Anggota;
11. Chalimah Pujihastuti, SE, Ak., MAFIS, Anggota;
12. Edward UP Nainggolan, Ak., Anggota;
13. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota;

14. Yulia Chandra K, S.Sos, Anggota;
15. Mulat Handayani, SE, Ak., Anggota;
16. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota;
17. Sugiyarto, SE, Ak., M.Sc., Anggota;
18. Farida Aryani, Ak., Anggota;
19. Eli Tamba, SE, Ak., Anggota;
20. Sumarno, SE, Ak., Anggota;
21. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota;
22. Dita Yuvrita, SE, Ak., Anggota;
23. Syaiful, SE, Ak., Anggota

Sekretariat KSAP terdiri dari:

1. Margustienny OA, Ak, MBA, Ketua;
2. Mulat Handayani, SE, Ak., Wakil Ketua;
3. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota;
4. Edward UP Nainggolan, Ak., Anggota;
5. Yulia Chandra Kusumarini SE, S. Sos., Anggota;
6. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota;
7. Sumarno, SE, Ak., Anggota.

BAB II



Dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan RPP SAP, KSAP menyusun rencana kerja jangka menengah, yang berupa rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja tahunan.

Rencana kerja ini disusun sesuai dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Berbagai hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan KSAP dalam mencapai kinerjanya. Lingkungan strategis paling menonjol yang dianggap telah mempengaruhi tugas KSAP selama tahun 2004 adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

Lingkungan Strategis

Pemerintah Pusat/Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban APBN/APBD yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya mulai tahun anggaran 2006. Dengan demikian Pemerintah perlu segera membangun sistem akuntansi yang mengacu kepada SAP.

Kebutuhan ini tidak dapat ditunda lagi karena hanya ada waktu dua tahun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SAP supaya dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meminimalkan asimetri informasi antara pemerintah dan pengguna laporan keuangan, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah. Kriteria pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah SAP. Dengan demikian penerbitan PP tentang SAP merupakan sesuatu yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pengguna.

Dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis tersebut, KSAP harus bekerja secara terarah dan terencana, dan dituangkan dalam suatu Rencana Strategis KSAP. Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis pada dasarnya mengarah pada penerbitan dan pemberlakuan SAP yang dapat diterima oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan.



Keterangan Foto: Dr. Mulia PN, Ketua Komite Konsultatif, Public Hearing Denpasar , 2003

RENCANA STRATEGIS

Visi

"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas"

Misi

1. Mewujudkan standar akuntansi pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

Tujuan

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.



RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH

TAHUN 2004 S.D. 2007

A. Tahun 2004		
1	Penerbitan PP SAP	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan draf PP SAP • Pembahasan dengan Setneg untuk penerbitan PP SAP
2	Sosialisasi PP SAP	Pelaksanaan Sosialisasi PP SAP di lima kota
3	Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan buletin teknis SAP • Neraca Awal • Bagan Perkiraan Standar • Penyusunan interpretasi SAP (5 ISAP)
4	Draf Publikasian (DP) SAP berbasis akrual	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan standar akuntansi berbasis akrual (KK + 7 PSAP) – Sesuai due process KSAP kecuali public hearing dan permintaan pertimbangan BPK • Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i> DP SAP akrual • Finalisasi Draf SAP akrual
5	SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional • Seminar/kongres/konferensi internasional
B. Tahun 2005		
1	Sosialisasi SAP	Pelaksanaan Sosialisasi SAP di 7 kota
2	DP SAP Berbasis akrual	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan 4 Draf SAP berbasis akrual • Pelaksanaan <i>Limited Hearings</i> • Pelaksanaan <i>Public Hearings</i> • Finalisasi Draf SAP
3.	Interpretasi dan Buletin SAP	Penyusunan Interpretasi dan buletin
4.	SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional • Seminar/kongres/konferensi internasional
C. Tahun 2006		
1	Draf Publikasian (DP) SAP berbasis akrual	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan delapan DP standar akuntansi berbasis akrual • Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i> DP SAP akrual • Pelaksanaan <i>Public Hearings</i> • Finalisasi Draf SAP akrual
2.	SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional • Seminar/kongres/konferensi internasional
D. Tahun 2007		
1	Draf PSAP berbasis Akrual final	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan DP Kerangka Konseptual dan PSAP 01 s/d 20 berbasis akrual
2.	Penerbitan PP Standar Akuntansi berbasis Akrual	<ul style="list-style-type: none"> • [REDACTED]



Keterangan Foto: Lokakarya Neraca Awal Pemerintah, Jakarta 2004

PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN KSAP TAHUN 2004

A. Program Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Derivasinya

1. *Kegiatan Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
 - Indikator kinerja : diselesaikannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 - Sasaran kinerja: ditetapkannya RPP SAP yang berisi Kerangka Konseptual dan sebelas PSAP dalam suatu Peraturan Pemerintah.
2. *Kegiatan penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP.* Interpretasi SAP (IPSAP) dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari kesalahan tafsir para pengguna SAP. Buletin teknis untuk memberikan arahan/pedoman penerapan PSAP maupun IPSAP.
 - Indikator kinerja: terbitnya 5 (lima) IPSAP dan 2 (dua) buletin teknis.
3. *Kegiatan penyusunan draf SAP berbasis akrual mulai tahun 2004.*
 - Indikator kinerja: terselesaikannya draf kerangka konseptual draf PSAP berbasis akrual. Pada tahun ini sasaran kinerja KSAP adalah 1 (satu) kerangka konseptual dan 7(tujuh) draf SAP berbasis akrual dari target keseluruhan 20 (dua puluh) PSAP.

B. Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan

1. *Kegiatan sosialisasi PP tentang SAP*
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan kepada para pengguna.
 - Indikator kinerja: terlaksananya sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang SAP dengan sasaran para penyusun laporan keuangan pemerintah, legislatif, aparat pengawas fungsional, akademisi dan organisasi profesi terkait di 5 (lima) kota.
2. *Kegiatan pengembangan kemampuan SDM KSAP.*
Untuk meningkatkan kemampuan para anggota KSAP, KSAP mengirimkan para anggotanya mengikuti berbagai seminar, kongres, konferensi bidang akuntansi baik di dalam maupun luar negeri. Disamping itu, KSAP juga melakukan berbagai riset dan pengkajian standar dan praktik akuntansi di berbagai negara.
 - Indikator kinerja: keikutsertaan anggota KSAP dalam berbagai seminar/kongres/ konferensi bidang akuntansi baik dalam maupun luar negeri dengan sasaran 34 orang.

BAB III

KINERJA KSAP

Capaian Kinerja

Capaian kinerja KSAP sejak awal pembentukan:

Tahun 2002.

Penyusunan Kerangka Konseptual dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s.d. 3 (*cash toward accrual*).

Tahun 2003.

Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 s.d. 11 (*cash toward accrual*).

Tahun 2004.

- Draft RPP tentang SAP.
- Draft SAP yang terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan sebelas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan berbasis Kas menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*).
- Penyelenggaraan Sosialisasi berupa Lokakarya Menyongsong Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Draft Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal. Sedangkan untuk Buletin Teknis Bagan Perkiraan Standar dan Interpretasi SAP belum berhasil disusun.
- Penyelenggaraan sosialisasi Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal.
- Draft Kerangka Konseptual dan 7 draft PSAP berbasis akrual.
- Pengiriman SDM KSAP untuk mengikuti berbagai seminar, kongres dan konferensi akuntansi baik di luar maupun dalam negeri.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Program Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Derivasinya

Kegiatan 1: Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Tahun 2002

- 4 draf publikasian SAP yaitu : Draft Publikasian (DP) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, DP PSAP No.1 : Penyajian Laporan Keuangan, DP PSAP No.2 : Laporan Realisasi Anggaran, DP PSAP No.3 : Laporan Arus Kas.
- Atas 4 DP tersebut selanjutnya dilakukan Dengar pendapat terbatas (*limited hearing*) di Jakarta pada 31 Oktober 2002 dan dilakukan dengar pendapat publik (*public hearing*) di 5 kota yaitu :
 - Jakarta, tanggal 2 Desember 2002
 - Makasar, tanggal 16 Desember 2002
 - Medan, tanggal 16 Desember 2002
 - Denpasar, tanggal 19 Desember 2002
 - Yogyakarta, tanggal 21 Desember 2002.



Keterangan Foto: Public Hearing, Makassar, 2002

*) Tujuan dari dengar pendapat terbatas tersebut adalah untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari para ahli di bidang akuntansi, sedangkan tujuan diadakan dengar pendapat umum adalah memperoleh masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan standar yang disusun tersebut, seperti para praktisi, auditor, Lembaga Sosial Masyarakat dan akademisi.

Tahun 2003

Selanjutnya mulai awal tahun 2003 KSAP telah melakukan pembahasan atas masukan-masukan dari dengar pendapat dan pihak-pihak lainnya untuk penyempurnaan Draf Publikasian SAP tersebut. Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan Draf Publikasian SAP yang sudah diperbaiki kepada BPK-RI dengan surat Nomor: S-9/MK.012/2003 tanggal 9 Januari 2003 untuk mendapatkan pertimbangan.

Terhadap permintaan pertimbangan tersebut, BPK-RI menyampaikan jawaban dengan surat Nomor: 19/S/I-IV/3/2003 tanggal 14 Maret 2003. Inti dari surat tersebut adalah BPK-RI belum dapat memberi pertimbangan karena draf tersebut dianggap belum mengakomodasi masukan-masukan dari beberapa perguruan tinggi dan Departemen Dalam Negeri, serta menghendaki agar KSAP yang dibentuk oleh Menteri Keuangan ditingkatkan pembentukannya dengan Keputusan Presiden. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Keuangan mengajukan Konsep Rancangan Keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dengan surat Nomor: S-309/MKI.012/2003 tanggal 15 Agustus 2003 kepada Presiden.

Selama proses tersebut, KSAP melanjutkan penyusunan draf Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berikutnya sesuai dengan rencana kerja tahun 2003, yang terdiri dari 8 (delapan) draft standar.

Selama proses penyusunan 8 Draf tersebut, KSAP melakukan beberapa kali diskusi dengan Tim Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan BPK-RI untuk memperoleh masukan-masukan yang diperlukan. Dengan disusunnya 8 draf SAP tersebut, maka sampai dengan tahun 2003 KSAP telah menyusun satu draf kerangka konseptual dan sebelas draf publikasian SAP.

8 (delapan) draf standar yang telah berhasil disusun, yaitu:

- Draf PSAP No. 4 : Catatan atas Laporan Keuangan
- Draf PSAP No. 5 : Akuntansi Persediaan
- Draf PSAP No. 6 : Akuntansi Investasi
- Draf PSAP No. 7 : Akuntansi Aset Tetap
- Draf PSAP No. 8 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- Draf PSAP No. 9 : Akuntansi Kewajiban
- Draf PSAP No. 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- Draf PSAP No. 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian

Terhadap draf SAP yang disusun tahun 2003 tersebut, KSAP melakukan *limited hearing* di Jakarta dengan para pakar di bidang akuntansi pada tanggal 18 November 2003. Kemudian pada bulan Desember 2003, KSAP melakukan *public hearing* untuk mendapatkan masukan yang lebih luas di 4 kota, yaitu :

1. Semarang, tanggal 04 Desember 2003
2. Jakarta, tanggal 04 Desember 2003
3. Medan, tanggal 11 Desember 2003
4. Denpasar, tanggal 19 Desember 2003

Setelah pelaksanaan *Limited Hearing* dan *Public Hearing* pada tahun 2003, KSAP melakukan penyempurnaan terhadap keseluruhan draf SAP. Penyempurnaan dilakukan berdasarkan masukan pada saat *limited hearing* maupun pada saat *public hearing* yang diselenggarakan pada tahun 2003. Di samping itu, KSAP juga menerima masukan tertulis dari berbagai pihak setelah *public hearing*.

Menindaklanjuti hasil *limited hearing* dan *public hearing* tahun 2003, KSAP melakukan pembahasan masukan dari berbagai pihak baik lisan maupun tertulis. Kemudian dari hasil pembahasan tersebut, dibahas lagi dengan Tim Penelaah SAP BPK-RI.

Dari hasil pembahasan bersama Tim Penelaah SAP BPK-RI tersebut, KSAP berkonsultasi dengan Komite Konsultatif dalam Rapat Pleno untuk membahas masalah-masalah substantif yang tidak dapat disepakati pada rapat-rapat sebelumnya dan membahas proses penetapan standar Akuntansi pemerintahan selanjutnya.

Dari hasil rapat-rapat tersebut KSAP menerbitkan Draf Standar Akuntansi Pemerintahan edisi Februari 2004. Draf ini merupakan penyempurnaan dari Draf Publikasian yang diterbitkan pada Bulan Desember 2003.

Draf SAP edisi Februari 2004 tersebut, diajukan kembali kepada BPK RI melalui Menteri Keuangan dengan surat Nomor: S-64/MK.012/2004 untuk diberikan pertimbangan.

Terhadap permintaan pertimbangan tersebut BPK RI menindaklanjuti dengan surat Nomor: 52/S/IV-XII.1/7/2004 perihal Draf Standar Akuntansi tanggal 13 Juli 2004. Pada surat tersebut BPK kembali meminta agar pemerintah segera membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Draf Standar Akuntansi yang sudah disampaikan Menteri Keuangan tersebut ke BPK dijadikan bahan utama dalam penyusunan konsep standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, KSAP dalam menyusun standar perlu memperhatikan basis akuntansi yang digunakan, mengingat ketentuan perundang-undangan, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2008

Dengan belum disetujuinya Draf SAP oleh BPK, KSAP terus melakukan penyempurnaan Draf SAP dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berusaha agar KSAP segera ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pada tanggal 5 Oktober 2005, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Sehubungan dengan telah terbitnya Keppres tentang pembentukan KSAP



Keterangan Foto: Drs. Handjari Ak, Ketua Tim Penelaah SAP, Badan Pemeriksa Keuangan, Diskusi Akademis tentang Draf SAP, Maksi UL

tersebut maka Draf SAP yang telah disempurnakan pada tanggal 22 November 2004, oleh Menteri Keuangan diajukan kembali kepada BPK untuk dimintakan pertimbangan. Sambil menunggu pertimbangan BPK, KSAP mengadakan diskusi tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Akademisi dari Magister Akuntansi Universitas Indonesia tanggal 28 Desember 2004.

Kegiatan 2: Penyusunan Buletin Teknis dan Interpretasi SAP

Untuk melengkapi SAP, KSAP telah menyusun draf Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah. Tujuan penyusunan Buletin Teknis ini untuk membantu entitas pelaporan dalam menyusun neraca awal yang sesuai dengan SAP dan mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam penyusunan neraca awal.

Dalam rangka memperoleh masukan dan penyempurnaan buletin teknis tersebut, KSAP melakukan lokakarya dengan tema *"Neraca Awal Pemerintah : Kendala, Tantangan dan Solusi."* Lokakarya diadakan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2004. Setelah diadakan lokakarya tersebut KSAP menyempurnakan kembali draf Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal berdasarkan masukan peserta lokakarya.

Pada Bulan Desember 2004 KSAP menyampaikan Materi Buletin Teknis Neraca Awal Pemerintah tersebut pada acara Konvensi Nasional Akuntansi di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh IAI.

Kegiatan 3: Penyusunan draf SAP berbasis akrual

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akrual selambat-lambatnya tahun 2008. Oleh karena itu sesuai dengan rencana lima tahunan, KSAP akan mengembangkan dan menyusun Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

Pada tahun 2004 KSAP telah mulai melaksanakan kegiatan penyusunan standar tersebut, berupa Kerangka Konseptual dan enam pernyataan standar berbasis akrual. Penyusunan standar berpedoman pada *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dan sumber lainnya. Strategi pengembangannya dilakukan dengan adaptasi, yaitu disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Penyusunan Draf standar berbasis akrual meliputi:

1. Kerangka Konseptual;
2. Penyajian Laporan Keuangan;
3. Laporan Arus Kas;
4. Surplus/Defisit Periode Berjalan, Koreksi Kesalahan, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi;
5. Dampak Perubahan Kurs Valuta Asing;
6. Akuntansi Biaya Pinjaman;
7. Laporan Keuangan Konsolidasian;
8. Akuntansi Investasi pada Rekan Usaha.

2. Program Pembangunan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Akuntansi Pemerintahan

Kegiatan 4: Sosialisasi PP tentang SAP

Berhubung sampai Desember 2004 Pertimbangan atas Draf SAP belum diberikan oleh BPK, maka PP SAP belum dapat diterbitkan. Hal ini berakibat KSAP belum dapat melaksanakan sosialisasi PP tentang SAP sesuai dengan rencana kerja.

Namun demikian dalam rangka mempersiapkan instansi pemerintah untuk menggunakan SAP dalam pelaporan keuangannya, KSAP telah mengadakan lokakarya *"Menyongsong Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan"* di Jakarta, tanggal 20 Desember 2004 dengan mengundang peserta dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, para akademisi dan Kantor Akuntan Publik. Tujuan dari lokakarya ini adalah memberikan persiapan dini kepada entitas pelaporan pemerintah dan pihak lain yang terkait agar mempersiapkan diri untuk menerapkan SAP pada tahun anggaran 2005.

Pembicara dalam lokakarya tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta, Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, yang merupakan anggota Komite Konsultatif Standar Akuntansi pemerintahan, dan para Anggota Komite Kerja.

Kegiatan 5: Pengembangan kemampuan SDM KSAP

Di bidang pengembangan SDM, KSAP mengirim beberapa anggotanya mengikuti seminar, kongres dan konferensi yaitu :

- International Conference on Accounting, Auditing and Management in Public Sector Reform, di Oslo, Norwegia tanggal 7 – 9 Oktober 2004;
- Konvensi Nasional Akuntansi di Jogjakarta, 13 – 15 Desember 2004;
- Simposium Nasional Akuntansi di Denpasar, 2 – 3 Desember 2004 .

Dalam rangka Sosialisasi SAP, KSAP juga telah membangun Website KSAP dengan alamat : <http://www.ksap.org>. Yang dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan Website ditujukan pada ekspose Draf PSAP dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung website. Pada website tersebut juga tersedia email untuk para anggota KSAP.

ASPEK KEUANGAN

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2004, KSAP mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 3,7 Milyar melalui Proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi dan Pengembangan Akuntansi – BAKUN – Departemen Keuangan. Sehubungan dengan belum terbitnya PP SAP, dan kegiatan sosialisasi belum dapat dikakukan, maka anggaran KSAP direvisi dan dialokasikan untuk kegiatan lain. Besarnya anggaran setelah revisi adalah Rp. 2.103.555.000,-. Untuk mencapai target kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2004, KSAP hanya memerlukan dana sebesar Rp1,7 Milyar atau sekitar 81 % dari anggaran yang dialokasikan. Dengan kata lain KSAP telah berhasil melakukan penghematan anggaran pada tahun 2004.

Demi independensi KSAP di bidang keuangan, Komite mempertimbangkan agar pada tahun mendatang dapat memperoleh aloksi dana tersendiri yang tidak merupakan bagian anggaran dari salah satu kementerian.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan yang dihadapi KSAP pada tahun 2004 adalah belum terbitnya PP SAP sehingga SAP belum bisa diimplementasikan. KSAP yang dibentuk dengan Keputusan Presiden saat ini telah melakukan penyempurnaan atas draf SAP. Draf SAP yang telah disempurnakan edisi Oktober 2004 telah sampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dimintakan pertimbangan kepada BPK-RI. Diharapkan draf PSAP yang disusun KSAP ini dapat diterima oleh BPK-RI yang pada masa sebelumnya BPK-RI selalu mensyaratkan keberadaan KSAP dengan Keppres. Jika BPK dapat menerima Draf SAP tersebut, maka proses penetapan RPP SAP akan dapat diteruskan.

KEJADIAN PENTING SETELAH

PERIODE PELAPORAN 2004

Pada tanggal 4 Januari 2005, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Keputusan ini mengubah komposisi keanggotaan Komite Konsultatif dan Komite Kerja.

Komite Konsultatif terdiri dari:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai merangkap Anggota
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara sebagai Anggota
5. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Anggota
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia sebagai Anggota
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia sebagai Anggota
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia sebagai Anggota
9. Ketua Dewan Penasihat Magister Akuntansi Universitas Indonesia.

Komite Kerja terdiri dari:

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM sebagai Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM sebagai Anggota
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc sebagai Anggota
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM sebagai Anggota
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM sebagai Anggota
8. Drs. AB Trihartanto, Ak., MM sebagai Anggota
9. Gatot Supriartono, Ak., M.Acc sebagai Anggota

Pada tanggal 17 Januari 2005, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan Pertimbangan atas draf Standar Akuntansi Pemerintahan dengan surat nomor: 01/S/I/01/2005 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan BPK-RI atas draf standar akuntansi pemerintahan, KSAP menyampaikan rancangan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Keppres Nomor 188 Tahun 1999, Menteri Keuangan mengirim surat Permintaan Pertimbangan Hukum atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai tindak lanjutnya dilaksanakan Pembahasan RPP tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diikuti dari beberapa departemen/lembaga dan pemerintah daerah. Dari pembahasan tersebut disepakati beberapa perubahan RPP SAP dan Menteri Keuangan dapat segera menyampaikan RPP SAP tersebut kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi peraturan Pemerintah.

BAB IV



Keterangan Foto: Pembahasan RPP SAP, Februari 2005

Rencana Kerja Tahun 2005

Menurut amanat UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang disampaikan ke DPR/DPRD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. SAP tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut diamanatkan SAP tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

KSAP sebagai komite yang dibentuk Presiden RI untuk mengembangkan SAP, telah mengembangkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), dan diharapkan standar tersebut ditetapkan menjadi peraturan pemerintah tahun 2005. Standar tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tahun 2005. Di samping menyusun SAP yang berbasis kas menuju akrual, KSAP juga harus mengembangkan SAP berbasis akrual (*full accrual*). Sesuai amanat UU 17/ 2004, basis akrual tersebut akan diterapkan pemerintah mulai sejak tahun 2008.

Untuk mendukung implementasi SAP tahun 2005 dan pengembangan SAP berbasis akrual, tahun 2005 KSAP perlu melakukan kegiatan sebagai berikut:

Sosialisasi SAP (Cash Toward Accrual)

PP SAP diharapkan dapat ditetapkan oleh Pemerintah awal tahun 2005. Setelah PP SAP ditetapkan, maka akan dilakukan pemasyarakatan terhadap PP tersebut. Pemasyarakatan PP tentang SAP akan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, lokakarya dan *Training of Trainer*. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu untuk menerapkannya.

Penyusunan SAP berbasis akrual

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menerapkan standar akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2008. Untuk mendukung terlaksananya amanat tersebut, KSAP akan menyusun draf Kerangka Konseptual dan sebelas draf PSAP berbasis akrual pada tahun 2005.

Penyelenggaraan Limited Hearing Draft SAP Berbasis Akrua

Sesuai dengan *due process* penyusunan SAP, KSAP akan melaksanakan 2 (dua) kali *limited hearing* atas draf SAP berbasis akrua. Tujuan *limited hearing* adalah untuk mendapatkan masukan atas draf SAP yang disusun.

Peserta *limited hearing* diharapkan berasal dari para akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan.

Limited Hearing pertama

diadakan untuk mendapatkan masukan atas draf Kerangka Konseptual dan tujuh draf PSAP. Sedangkan *limited hearing* yang kedua untuk mendapatkan masukan atas empat draf PSAP yang terakhir.



Dari Kiri: Prof. Mardiasmo, Dr. Mulia PN, dan Dr. Ahmadi Hadibroto, Rapat Pleno Komite Konsultatif, 2005

Rencana Kerja Tahun 2005

Pemeliharaan Help Desk

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP lainnya. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP akan membentuk *help desk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, kemudian KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrua, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Untuk itu KSAP mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/workshop/training baik di dalam maupun di luar negeri.

Penyusunan Buletin Teknis dan Interpretasi atas SAP

Disamping membuat *help desk*, KSAP juga akan menyusun buletin teknis dan interpretasi KSAP. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap *issue* tertentu yang ditemui dalam SAP berbasis akrua, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

Pemeliharaan Website

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berakitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

BAB V

PENUTUP



Laporan yang telah disajikan KSAP ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan.